

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan pada era informasi dan globalisasi menjadi peran yang sangat dibutuhkan sebagai wadah penyedia sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Dalam Undang-undang No. 43 Tahun 2007 perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis seseorang, berbentuk cetak dan tertulis didalam buku yang di simpan secara tertata menurut pada peraturan pengelolaan Perpustakaan Nasional guna dalam memenuhi penelitian, pendidikan dan sumber pustaka yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat umum.

Negara Indonesia sebagai Negara yang besar dalam abad ke-21 ini dituntut untuk harus mampu dalam mengembangkan budaya literasi melalui pendidikan yang merata dan terintegrasi, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah sampai lingkungan masyarakat. Untuk menumbuhkan budaya literasi sampai ke masyarakat pemerintah tidak hanya membangun perpustakaan umum saja tetapi juga Perpustakaan Desa (Perpusdes). Perpustakaan Desa melalui Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dalam pasal 1 dan 2 tentang perpustakaan menyatakan bahwa “desa/kelurahan yaitu sebagai salah satu penyedia dan sumber bacaan belajar bagi masyarakat dalam

rangka memberdayakan masyarakat serta sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan nasional.”

Perpustakaan Desa tidak terlepas dari usaha dan peranan pemerintah dalam upaya mencerdaskan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang No.43 pasal 49 Tahun 2007 tentang pembudayaan kegemaran dalam membaca yang menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib mendorong tumbuhnya taman baca masyarakat dan rumah baca dalam menunjang pembudayaan kegemaran membaca di masyarakat” (Rahmawati 2012:29). Dalam perencanaan programnya mengacu pada UU Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 pasal 48 yang dimana “pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat”.

Perpustakaan Desa berguna sebagai salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa/kelurahan setempat. Perluasan Perpudes merupakan upaya dari pemerintah dalam mendorong gerakan Literasi demi kemajuan pendidikan sekalipun itu di daerah pedesaan atau pelosok Negeri. Tujuan ini sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan dan membangun pola pikir yang maju dalam meningkatkan ketrampilan dan juga sebagai upaya mengatasi tingkat pengangguran dalam membuat kebijakan agar setiap masyarakat dapat mengakses pendidikan yang mudah dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. Perpudes sebagai program yang mempunyai nilai

edukasi, dan penyalur fasilitator dan bahkan menjadi program *learning center* bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) hanya mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari 68,40 menjadi 68,90 di tahun 2013. Sedangkan menurut data yang telah di rilis oleh Badan Program Pembangunan (BPP)/*United Nations Development Program* (UNDP), IPM di Indonesia pada tahun 2013 berada pada peringkat 108 dari 187 negara di ASEAN. Angka ini menunjukkan Indonesia tertinggal jauh di bawah Negara ASEAN yang lainnya. Sementara itu, Indonesia juga mendapati peringkat ke 64 dari 72 negara, survey ini dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2015 dan di umumkan pada Desember 2016. Jadi, selama kurun waktu 2012 sampai tahun 2015, PISA menunjukkan bahwa Indonesia hanya mendapat 1 poin dari 396 menjadi 397. (Kemendikbud, 2017)

Dari masalah tersebut maka literasi menjadi masalah serius bagi Indonesia, dalam survey dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA) Tahun 2015, maka Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara lain apalagi dalam era global saat ini. Karena data minat baca dan buta aksara juga berpengaruh terhadap posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) Indonesia,

yang dimana di ukur dari usia harapan hidup serta pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan.

Untuk membangun budaya literasi ini berhasil sampai ke masyarakat dan merata pada seluruh ranah pendidikan di Indonesia, sejak tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam program Gerakan Literasi Nasional ini melalui sosialisasi, kegiatan literasi, organisasi dimasyarakat dan lembaga lain. Pelibatan dari kegiatan ini bertujuan agar kampanye literasi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan gerakan literasi diharapkan menjadi pendukung dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia dari wilayah perkotaan sampai daerah yang terpelosok sekalipun guna untuk berperan aktif dalam menumbuhkan budaya literasi.

Indonesia terbilang mampu dalam menurunkan buta aksara pada masyarakatnya. Hasil sensus melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 yang dimana merupakan tahun pertama dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 menunjukkan jumlah masyarakat Indonesia buta aksara hanya tinggal 5.629.943 orang atau 3,49%. Sedangkan, data dari BDSPK dan BPS menunjukkan tingkat melek aksara masyarakat Indonesia mulai umur 15-59 tahun sebesar 96.51%. Jumlah

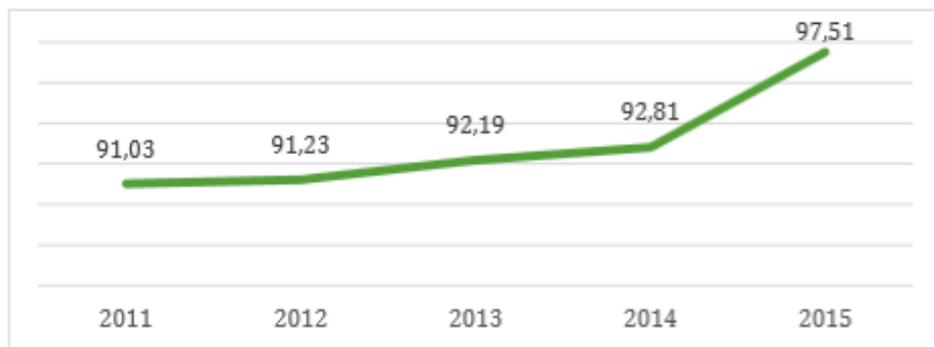
tersebut masih bisa terus turun seiring dengan waktu dan di era globalisasi yang dimana pendidikan telah dianggap sebagai prioritas penting. (Kemendikbud, 2017)

Gerakan Literasi merupakan bagian dari program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan gerakan literasi ini dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya membangun Taman Bacaan Masyarakat, pojok baca, perpustakaan keliling, dan atau Perpustakaan Desa. Gerakan Literasi Masyarakat (GLS) melalui Perpustakaan Desa ini merupakan aspek penting dalam program pembangunan desa dan telah menjadi prioritas sasaran dari program literasi karena rendahnya literasi berada di luar sekolah yakni dilingkungan masyarakat yang memang pendidikannya masih rendah.

Menurut Duta Baca Perpustakaan Nasional RI Tingkat minat baca Negara Indonesia masih tergolong rendah, dan bahkan Negara Indonesia mendapat peringkat ke 60 dari 61 negara yang disurvei. Survei tersebut berasal dari *Central Connecticut State University* yang dilakukan pada Maret 2016. Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang dimana tinggi minat baca masyarakat Indonesia hanya 0.01 persen pertahun. Hal tersebut tentunya menjadi masalah bersama bagi Indonesia yang harus kita selesaikan bersama-sama demi kemajuan pendidikan dan sarana memberantas buta aksara, maka program Perpustakaan

atau Taman Baca Masyarakat menjadi salah satu upaya dalam menanggulangi masalah tersebut.

Di Kota Yogyakarta sendiri indeks minat baca masyarakat juga masih rendah dibandingkan dengan kota-kota maju lainnya. Berdasarkan indeks baca nasional, minat baca Kota DIY pada tahun 2015 hanya sebesar 0.18 dan indeks nasional sebesar 0,01. Sedangkan, rata-rata indeks di Negara Indonesia antara 0.45-0.62. Sedangkan berdasarkan UNESCO pada tahun yang sama minat baca masyarakat Indonesia hanya 0.001 artinya dari 1000 orang hanya 1 orang yang mau membaca. Menurut Wibowo yang bekerja dibadan BPAD DIY mengatakan rata-rata masyarakat sekarang lebih suka menonton, dan mendengarkan daripada membaca, hal tersebut yang menunjukkan minat baca di Indonesia terbilang rendah. (Nurul & Yoyon, 2015)



Gambar 1.1

Trend Angka Melek Huruf Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

Sumber: BPS, 2016

Realisasi pada gambar Trend Angka Melek Huruf Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 menunjukkan hasil positif, *Trend* Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul sendiri mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebesar 91,03%, tahun 2011 sebesar 91,23%, tahun 2013 sebesar 92,19%, tahun 2014 sebesar 92,81%, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 97,51. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mampu dalam mengurangi masalah buta aksara.

Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul yang dipelopori oleh Bupati Bantul Suharsono dalam upaya untuk meningkatkan minat baca di Kabupaten Bantul menciptakan program Gerakan Literasi Bantul yang bertujuan menumbuhkan minat baca masyarakat di Desa, Pemerintah Kabupaten Bantul mengaktifkan kembali perpustakaan desa. Pemerintah desa juga diminta menganggarkan 5% dari APBD Desa untuk pengelolaan Perpustakaan Desa. Selain itu Desa juga di berikan kewenangan membentuk dan mengelola perpudes dengan menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Regulasi tersebut sudah disiapkan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 041/01659/Dispusip tentang Gerakan Literasi Bantul. Selain itu regulasi tersebut juga diperkuat dalam instruksi Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang gerakan literasi yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul “Makarya Mbangun Desa” untuk

mewujudkan Bantul Cerdas program tersebut semakin menguatkan penganggaran bagi perpustakaan di Desa.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPA) Kabupaten Bantul terus berupaya membentuk perpustakaan desa. Hingga saat ini, di Kabupaten Bantul ada 75 desa namun baru 52 desa yang memiliki perpusdes. Upaya perpusdes ini merupakan bagian dari program literasi, maksud dan tujuan ini adalah untuk mencerdaskan masyarakat melalui budaya gemar membaca dikarenakan minat baca masyarakat bantul masih rendah karena baru diangka 3% dan butuh ditingkatkan. (Ketua Dispusip Bantul, 2018)

Dalam meningkatkan pengelolaan dan mengaktifkan gerakan literasi ini berjalan dengan semestinya Dispusip Kabupaten Bantul rutin menggelar perlombaan Perpustakaan. Untuk tahun 2018, Perpustakaan Wukirsari mewakili Bantul dalam lomba perpustakaan tingkat nasional. Pustaka Desa Wukirsari berdiri sejak 2012, keberadaan fasilitas perpustakaan ini tidak hanya sekedar menjadi kampanye budaya membaca namun juga sebagai pemberdayaan masyarakat di Desa Wukirsari dan juga berguna sebagai studi advokasi kebijakan pustaka desa sehingga dapat menjadi contoh kepada perpustakaan di daerah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara setelah melakukan observasi di tempat penelitian dengan narasumber, Pustaka Desa Wukirsari memberikan informasi

bahwa adanya Perpustakaan pada Pustaka Desa Wukirsari ini memberikan dampak yang baik dan kemajuan bagi wadah pengetahuan dan pemberdayaan bagi masyarakat setempat. Pustaka Desa Wukirsari mendapat penghargaan sebagai Perpustakaan terbaik dan mewakili Kabupaten Bantul maju dalam lomba Perpustakaan tingkat Nasional di Jakarta dan mendapat juara ke-3 secara Nasional pada tahun 2018, selain itu Pustaka Desa Wukirsari mendapat juara pertama Perpustakaan terbaik se-Provinsi DIY di tahun yang sama. Pustaka Desa Wukirsari memiliki kegiatan dan program pengembangan masyarakat diantaranya adalah Penyelenggaraan sirkulasi pustaka Desa Pemberdayaan bagi masyarakat, Pemberdayaan Anggota dan Pengurus Pustaka Desa Wukirsari, dan Studi dan Advokasi Kebijakan Pustaka Desa. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan Studi dan Advokasi Kebijakan Pustaka Desa ini adalah mendorong terbitnya Peraturan Desa (Perdes) tentang Pustaka Desa Wukirsari, Perencanaan dan penganggaran partisipatif dalam penyelenggaraan Pustaka Desa, serta pengembangan kerjasama dengan Mitra Jejaring dan *stake holders*. (wukirsari.bantulkab.go.id)

Pustaka Desa Wukirsari juga bekerja sama dengan beberapa mitra swasta, Pemerintah Desa dan juga masyarakat dalam pengembangan pojok-pojok baca di setiap dusun guna untuk meningkatkan literasi dan mendekatkan buku kepada masyarakat melalui spot-spot baca yang biasa digunakan masyarakat untuk beraktifitas. Pojok-pojok baca tersebut di setiap

dusun di desa wukirsari memiliki karakteristik yang berbeda karena Desa Wukirsari masuk dalam salah satu desa wisata di desa wukirsari, mulai dari sentra batik, sentra wayang dan kalen edukasi. Tujuan ini guna mendekatkan masyarakat dengan buku dan meningkatkan literasi dengan kearifan lokal yang ada di Desa Wukirsari.

Dalam pengembangan Perpustakaan tersebut dilakukan oleh beberapa peran yang terdiri dari pihak mitra swasta serta peran pengurus dari Pustaka Desa Wukirsari, serta masyarakat Desa Wukirsari (tokoh masyarakat, pemuda, pengrajin dan paguyuban-paguyuban di desa wukirsari). Peran pemerintah membantu sebagai fasilitator dan pembuat peraturan pada perdes tentang rincian dan kebijakan dari perpustakaan. Sedangkan peran swasta sendiri adalah sebagai mitra dalam membantu mengembangkan perpustakaan ini agar tetap berjalan dan literasi meningkat di Desa Wukirsari melalui adanya Perpustakaan dan pojok-pojok baca di Desa Wukirsari Imogiri Kabupaten Bantul. Selanjutnya, masalah yang didapat dari penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa di rasa belum optimal hal ini dibuktikan dengan belum tercantumnya secara lengkap dan tidak adanya komitmen politis di Pemerintah Desa Wukirsari dalam memperkuat perdes yang mengatur tentang Perpustakaan di RPJMDes yang dimana dalam RPJMDes Tahun 2016-2022 tidak disebutkan adanya peraturan tentang perpustakaan yang dimana Pustaka Desa Wukirsari tersebut sebagai salah satu nilai unggul yang ada di Desa Wukirsari

dan mewakili Kabupaten Bantul dalam ajang Perpustakaan terbaik secara Nasional. Peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan dalam pengembangan program daripada gerakan literasi yang ada di masyarakat desa dalam menumbuhkan minat baca dan meningkatkan literasi sampai ke masyarakat yang di mana di Desa Wukirsari ini melalui Perpustakaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang terkait dari peran Perpustakaan yang bertujuan dalam meningkatkan literasi minat baca di masyarakat desa, dengan judul penelitian **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM Mendukung Perpustakaan Untuk Meningkatkan Literasi Di Desa Wukirsari Imogiri Kabupaten Bantul”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebagai rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung Perpustakaan untuk meningkatkan literasi di Desa Wukirsari Imogiri Kabupaten Bantul?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah peranan Pemerintah Desa dalam mendukung

Perpusdes untuk meningkatkan literasi di masyarakat desa melalui Pustaka Desa Wukirsari Imogiri.

Dari Tujuan penelitian di atas hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang baik dari segi manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sumbangan wacana terhadap gerakan literasi di desa dan di daerah lainnya melalui Perpusdes.
- b. Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai pengembangan teori oleh penulis lainnya untuk penelitian lanjutan dengan tema dan topik yang terkait dalam penelitian ini melalui program gerakan literasi di masyarakat desa.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan pihak-pihak terkait tentang pentingnya peran Perpusdes dalam meningkat literasi di masyarakat desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada pemerintah dalam memperkuat gerakan literasi di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka/Literature Riview

NO	NAMA	TAHUN & JUDUL	ISI
1	Ane Permatasari	(2015). Membangun Kualitas Bangsa Dengan Budaya Literasi	Penelitian ini menunjukkan bahwa Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia, ada banyak faktor mengapa permasalahan literasi masyarakat Indonesia sangat rendah. Masalah literasi menjadi permasalahan yang serius bagi Pemerintah Indonesia karena dari budaya “melek bacaan” tidak mustahil bagi bangsa Indonesia tidak hanya menjadi Negara berkembang tapi menjadi Negara yang maju karena meingkatkan budaya literasi pada setiap masyarakat.
2	Andri, Salcha dan Elnovani	(2016). Model Aktivitas Literasi Berbasis Komunitas Di Sudut Baca Soreang	Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk aktivitas dari gerakan literasi Sudut Baca Soreang (SBS) dimotori oleh relawan serta menjadi ujung tombak dalam melakukan berbagai kegiatan gerakan literasi yang ditujukan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut juga dilakukan evaluasi secara rutin dan tahunan. Model kegiatan ini dapat menggerakkan literasi dan sebagai penggerak aktivitas literasi dan advokasi bidang literasi.

3	Suharmo no Kasiyun	(2015). Upaya Meningkatkan Minat Baca Sebagai Sarana Untuk Mencerdaskan Bangsa,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat baca mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Dibandingkan dengan Negara tetangga, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Aspek keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu upaya dalam meningkatkan minat baca, anak-anak sejak dini diberi stimulant agar minat baca muncul sendiri dalam diri seseorang. Dengan cara memaksa adalah cara yang sangat tidak efektif untuk menumbuhkan minat baca masyarakat.
4	Sitaresmi Suryani Retno, Yuli Rohmiyati, dan Jazimatul Husna	(2015). Pemberdayaan Masyarakat melalui Perpustakaan: Studi Kasus di Rumah Pintar “Sasana Ngudi Kawruh” Kelurahan Bandarharjo-Semarang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan yang dilakukan di Rumah Pintar “Sasana Ngudi Kawruh” Kelurahan Bandarharjo meliputi pelatihan kewirausahaan berupa pelatihan boga dan keterampilan, penyelenggaraan lomba guna menarik minat warga memanfaatkan perpustakaan serta ditunjang dengan layanan perpustakaan seperti mobil pintar, pemutaran film, pelatihan komputer, <i>story-telling</i> dan bimbingan belajar. Selebihnya pemberdayaan juga dianalisis

			sebagai suatu program dan proses.
5	Fiqi Barizul Rahman, dan Malta Nelisa.	(2018). PENERAPAN PROGRAM KREATIF DI TAMAN BACAAN MASYARAKAT KOMUNITAS TOGOK DI KELURAHAN GANTING KOTA PADANG PANJANG	Hasil penelitian ini menunjukkan tentang implementasi program kreatif TBM di kota Padang Panjang: (2). Mendeskripsikan masalah implementasi program kreatif TBM di kota Padang Panjang: (3). Mendeskripsikan dampak implementasi dari program kreatif TBM di kota Padang Panjang.
6	Regina Ferani Putri, dan Nurizzati	(2018). PEMANFAATAN LENTERA NAGARI SEBAGAI TAMAN BACA BAGI ANAK DI TAPAN PESISIR SELATAN	Hasil penelitian ini menunjukkan Pemanfaatan Lentera Nagari sebagai ruang baca untuk anak-anak di Tapan Pesisir Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil dari lentera Nagari di Tapan Pesisir Selatan, mendeskripsikan kendala dan upaya yang dilakukan pihak Lentera Nagari dalam pemanfaatan taman baca untuk anak, dan menjelaskan dampak yang dihadapi oleh Lentera Nagari dalam pemanfaatan taman bacaan untuk anak-anak.
7	Asep Saeful Rohman dan Sukaesih	(2017). TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: STUDI KASUS DI DESA	Hasil penelitian menunjukan bahwa perpustakaan dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta potensi lokal. Berbagai program pelibatan masyarakat dalam belajar dan berkegiatan di bidang pertanian, perkebunan,

		MARGAMUKTI - PANGALENGAN BANDUNG	dan ekonomi kreatif dikembangkan secara inovatif oleh pengelola perpustakaan. Untuk menjangkau masyarakat yang ada di pelosok, disediakan layanan mobil perpustakaan keliling. Kemitraan dilakukan dengan berbagai stakeholders. Perpustakaan Pabukon Saba Desa berhasil melakukan transformasi dan berperan aktif dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi hijau berbasis literasi.
8	Anjar Siswo Saputro	(2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SMA NEGERI 2 BANTUL	Penelitian ini menunjukkan bahwa. Keberhasilan program Gerakan Literasi Sekolah tidak lepas dari partisipasi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Gerakan waqaf buku, perjanjian kerjasama dengan berbagai instansi, dan pemberian penghargaan merupakan upaya-upaya yang dapat di tempuh untuk mensukseskan gerakan literasi sekolah. Di samping itu pengimbasan pada sekolah di sekitar merupakan upaya untuk melebarkan sayap literasi ke setiap jenjang pendidikan.
9	Isti Indriyani , Tri joko Raharjo, dan Ilyas	(2017). Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat dalam Kemajuan Literasi pada Pondok Maos Guyub Kendal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan TBM berawal dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan , pembinaan, penilaian, pengembangan, (2) Dampak pengelolaan TBM terhadap

			kemajuan literasi yang dirasakan masyarakat yaitu dampak pada kecakapan akademik, kecakapan personal, dan kecakapan vokasional.
10	Susy, Sri dan Bambang .	(2018). Pembentukan Karakter Melalui Literasi dari Aspek Satra dan Budaya di Desa Manik Maraja Kec Sarimatondang Kabupaten Sidamanik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya minat baca pada masyarakat. Hal ini mengakibatkan pengetahuan yang kurang memadai untuk menanggapi perkembangan dan kemajuan secara umum. Melihat dan mengamati keadaan ini perlu diadakan sosialisasi Literasi berbasis Karakter bagi masyarakat Manik Maraja kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun untuk memberikan pengetahuan dan semangat untuk menghadapi tantangan kemajuan saat ini. Karakter perlu mendapat perhatian yang serius melihat kemerosotan moral akhir akhir ini yang terjadi di setiap lini masyarakat, hal ini menghawatirkan bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia kedepan.

Diolah oleh penulis, 2019

Hasil dari pemaparan kumpulan *literature riview* di atas yang ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan banyak persamaan dimana penelitian yang ditulis sangat berkaitan tentang permasalahan literasi yang dilihat dari strategi dan program yang dilakukan guna memperkuat

literasi minat baca yang ada di masyarakat. Yang menjadi pembeda di penelitian ini adalah, penulis mencoba membuat penelitian yang dimana tolak ukurnya dilihat dari bagaimana peran Pemerintah Desa Wukirsari Imogiri Bantul dalam mendukung perpustakaan di Pustaka Desa Wukirsari sebagai tujuan meningkatkan literasi di Desa Wukirsari dan menumbuhkan budaya minat baca di Masyarakat desa yang menjadi prioritas dalam sasaran program Gerakan Literasi Masyarakat guna menurunkan angka buta aksara.

E. Kerangka Dasar Teori

1. PERAN

Peran adalah sesuatu perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Jika berada dalam masyarakat peranan ini bisa ditujukan pada suatu himpunan, organisasi atau gerombolan. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam status seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Rober Linton (1936) dalam (Pradana, 2015), telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. (Soerjono Soekanto,1986)

Menurut Soerjono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi berdasarkan dari beberapa teori diatas peneliti menyimpulkan bahwa peranan adalah perilaku individu, organisasi, kelompok yang memiliki

kedudukan pada posisi tertentu dan dapat mempengaruhi status sosial atau kepentingan lainnya, dan bahkan dapat menciptakan suatu kebijakan di sekitarnya.

Selanjutnya, Pengertian peran menurut Kreitner and Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014:14), adalah tatanan perilaku yang diharapkan seseorang dari suatu posisi. Sedangkan Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:182) mengatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.

Berdasarkan pengertian di atas, peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

a. Aspek- aspek Peran

Biddle dan Thomas dalam (Sarwono, 2015) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

b. Orang Yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

1. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
2. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok).

Dari penjelasan yang dipaparkan diatas mengenai peranan, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003) dalam (Gunena, 2013), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mengartikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran

bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

Dari uraian di atas bahwa peran (*role*) merupakan suatu sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, atau konsep tentang apa yang dilakukan atau perilaku individu dalam organisasi sesuai dengan kedudukan (*status*) yang dimilikinya. Peranan terbentuk atas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. PEMERINTAH DESA

a. Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang

hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif.

Pemerintah berasal dari kata Pemerintah, yang paling sedikit kata “Perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, dan pihak yang memerintah mempunyai wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan. Didalam pemerintahan juga mempunyai arti luas dan arti sempit.

Menurut Inu Kencana Syafie (2011: 10) yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Pemerintahan, sebagai berikut:

“Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. Ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara”.

Berdasarkan penjelasan diatas yaitu pemerintahan dalam arti sempit adalah berada di pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa didalamnya, sedangkan, Pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa.

b. Pengertian Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang dimiliki di daerah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah daerah kabupaten. Maksud dari isi undang-undang ini adalah masyarakat diberi peran dan tanggung jawab besar untuk pembangunan di daerahnya sendiri. Selain itu masyarakat setempat juga dituntut untuk berinovasi serta berkeaktivitas dalam mengelola potensi sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing.

Menurut R.H. Unang Soenardjo yang dikutip dari buku Hanif Nurcholis mengatakan tentang Desa ialah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Dalam Pengertian Desa yang dikutip dari buku HAW.Widjaja, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil dan kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Dalam wilayah desa dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Kewenangan Desa khusus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa antara lain menetapkan peraturan desa, memilih pimpinan Pemerintahan Desa, memiliki kekayaan

sendiri, menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menyelenggarakan gotong royong, dan lain-lain. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 18 Desa memiliki wewenang yang menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pemaparan diatas, disimpulkan bahwa Desa adalah tempat atau daerah yang mempunyai hak dan wewenang dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri yang berdasarkan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. (Awang, 2010) dalam (Almasri & Deswimar, 2014), memberikan pengertian bahwa Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat (Soemantri,2010:7).

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Setiap desa memiliki potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sudah sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintahan desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat.

Kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri ketimbang sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten. Sebagai konsekuensinya, kepala desa tidak lagi mempertanggungjawabkan penelenggaraan Pemerintahan desa kepada bupati melainkan kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa.

Selanjutnya, menurut Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah:

- a. Tugas bidang pemerintahan
- b. Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
- c. Tugas bidang ketatausahaan.

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa pemerintahan desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU 6/2014 adalah Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Dalam menjalankan roda pemerintahn di Desa seorang Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fungsi dari Pemerintah Desa bertujuan untuk mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ada di Desa.

3. PERPUSTAKAAN DESA

Perpustakaan adalah fasilitas publik sebagai tempat penyedia sumber pengetahuan yang berbentuk buku dan tertulis. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.”

Dalam keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 3 tahun 2001, perpustakaan desa adalah:

“Perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan.”

Sedangkan menurut Sutarno (2008:9) dalam Maskurotunitsa & Rohmiyati, Perpustakaan desa adalah lembaga layanan publik yang berada di

desa. Sebuah unit layanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat tersebut. Tujuannya untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan dan rekreasi kepada semua lapisan masyarakat. Masyarakat yang dilayani terdiri atas semua penduduk yang beraneka ragam latar belakangnya. Mereka tinggal di suatu desa dengan memiliki suatu ikatan.

Berdasarkan dari uraian diatas menurut para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa Perpustakaan Desa (Perpusdes) merupakan prasarana pelayanan kepada masyarakat desa yang berisi koleksi buku yang bertujuan sebagai penyedia informasi dan Ilmu Pengetahuan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan di lingkungan masyarakat.

4. LITERASI

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya *literacy* berasal dari bahasa Latin “*littera*” (huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Namun demikian, literasi utamanya adalah belajar dan membaca seumur hidup. Sebelumnya Literasi hanya diartikan sebagai kemelek-hurufan. Namun hal ini merupakan persepsi yang salah. Mengartikan literasi sebagai kemelek-hurufan dapat berakibat pada terjadinya anomali melek huruf. Dimana yang dimaksudkan melek huruf adalah hanya berkisar pada kemampuan baca tulis secara harfiah dan teknis. Bukan secara budaya dan mendalam. Oleh karena itu literasi lebih sesuai diartikan sebagai keberaksaraan.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Irkham dalam (Gong, 2012) bahwa literasi adalah keberaksaraan. Jadi literasi memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar ke pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis metalinguistik unit gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dari dampak sejarah manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan barat (Goody & Watt, 1963). Bahkan perubahan evolusi manusia merupakan dampak dari pemikiran literasi (Donald, 1991).

Kajian mengenai literasi dalam tulisan ini lebih berfokus pada keterampilan membaca. Sebagai kegiatan utama literasi di samping menulis, membaca juga mengalami perubahan paradigma. Hal ini membuat para ahli membaca menyadari bahwa membaca merupakan kegiatan yang kompleks. Seperti yang diungkapkan oleh Caldwell (2008) bahwa “reading is an extremely complex and multifaceted process”. Pembaca secara aktif terlibat dalam berbagai proses yang terjadi secara simultan. Pertama, pembaca melakukan pengkodean baik secara perseptual maupun konseptual (perceptual and conceptual decoding). Proses ini melibatkan kegiatan memaknai kata dan menghubungkannya dengan unit ide atau proposisi.

Tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Penumbuhan Budi Pekerti. Gerakan ini bertujuan dalam menumbuhkan minat baca masyarakat dan memberantas angka buta aksara. Ranah GLS meliputi;

a. Gerakan Literasi Sekolah

Pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat seperti kegiatan ekstrakurikuler.

b. Gerakan Literasi Keluarga

Gerakan literasi keluarga dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga

c. Gerakan Literasi Masyarakat

Gerakan literasi masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik (Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Desa, Pojok Baca), dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi

Dalam buku panduan Gerakan Literasi dijelaskan Dimensi Literasi sebagai berikut:

a. Literasi Baca dan Tulis

Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.

b. Literasi Numerasi

Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; (b) bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.

c. Literasi Sains

Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.

d. Literasi Digital

Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

e. Literasi Finansial

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan (a) pemahaman tentang konsep dan risiko, (b) keterampilan, dan (c) motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

f. Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

Model Literasi Informasi Menurut UNESCO yang dikutip oleh Nasution (2013: 12-13), memasukkan enam kategori kelangsungan hidup kemampuan literasi abad 21 yang terdiri dari:

1. *Basic Literacy*;
2. *Computer literacy*;
3. *Media Literacy*;
4. *Distance Learning dan E-Learning*;
5. *Cultural Literacy*;
6. *Information literacy*.

Dari uraian diatas penulis memasukkan Gerakan Literasi Masyarakat (GLS) yang dimana Gerakan Literasi ini sangat cocok dengan unit analisis yang akan digunakan penulis di Perpudes dalam meningkatkan literasi di masyarakat desa. Perpustakaan Desa salah satu adalah fasilitas publik dalam mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sebagai fasilitas publik Perpustakaan Desa tentu saja harus selalu disosialisasikan. Dengan demikian Perpustakaan Desa ini berperan sebagai sarana media informasi, pendidikan, hiburan dan sarana sosialisasi dengan kata lain sebagai sarana untuk penyebaran ide, kebijakan dan aturan-aturan baru yang berguna mengembangkan literasi di masyarakat.

F. Definisi Konseptual

Untuk menjelaskan lebih spesifik dalam penelitian ini, yaitu dengan definisi Konseptual dan Operasional.

Definisi Konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah dalam penelitian berdasarkan dari kerangka dasar teori yang dipaparkan diatas dan disimpulkan lagi dengan singkat dari masing-masing variabelnya sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah suatu status atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam menjalankan kebijakan. Peran dalam pemerintah adalah serangkaian tanggung jawab dan akuntabilitas yang dapat di alokasikan oleh satu atau lebih dari orang dalam memutuskan dan menjalankan dari suatu kebijakan.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah salah satu dari lembaga pemerintahan yang bertugas dalam mengelola Wilayah yang berada di tingkat Desa. Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Sedangkan Desa menjalankan fungsinya diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

3. Perpustakaan Desa (Perpusdes)

Perpustakaan Desa adalah fasilitas publik yang dapat digunakan secara umum dalam penyedia layanan pendidikan, sumber informasi, dan pemustaka yang di kelola oleh masyarakat desa guna menumbuhkan budaya baca masyarakat di pedesaan.

4. Literasi

Literasi adalah budaya dalam belajar, berbahasa dan menulis. Literasi merupakan tolak ukur dari suatu Negara dalam melihat tingginya minat baca dan menulis yang bisa dilihat dari *Human Development Index* pada suatu Negara di dunia.

G. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan lebih empiris dalam sebuah penelitian, Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka penulis akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini Peran Pemerintah Desa dalam mendukung Perpudes untuk meningkatkan literasi di desa dapat di ukur dari beberapa dimensi peran meliputi aspek aspek sebagai berikut:

Tabel 1.2
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
----	----------	-----------

1.	Peran sebagai suatu kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan yang tepat <ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum dari kebijakan yang digunakan b. Impementasi pelaksanaan yang baik <ul style="list-style-type: none"> - Hasil dari kebijakan yang berhasil dilaksanakan
2.	Peran sebagai strategi	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk partisipatif masyarakat dalam kegiatan b. Kredibilitas dalam mengambil keputusan <ul style="list-style-type: none"> - Peran yang mempunyai wewenang dalam memutuskan atau membuat suatu kebijakan
3.	Peran sebagai alat komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Transparansi pemerintah kepada masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Upaya pemerintah dalam keterbukaan alokasi dana dan informasi b. Pelayanan kepada

		masyarakat - Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat
--	--	---

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Masyhud (2012:80) penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan suatu kondisi dan keadaan secara ilmiah. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha dilakukan untuk mendeskripsikan suatu subyek sebuah penelitian secara mendalam yang berkaitan dengan latar belakang masalah, gejala terjadinya masalah, serta sebab-sebab terjadinya masalah suatu individu atau kelompok.

Menurut Sugiyono (2014:1) metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan dalam meneliti kondisi suatu obyek yang ilmiah dimana peneliti sendiri sebagai kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, analisis data dan hasil penelitian dengan metode kualitatif ini lebih menekankan makna daripada

generalisasi. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam mendukung Perpusdes untuk meningkatkan literasi di masyarakat Desa dan mengambil studi kasus di Desa Wukirsari Imogiri Kabupaten Bantul.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti Sanusi (2014: 104). Data primer adalah data yang didapat secara langsung seperti melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Dalam proposal penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara teknik wawancara. Wawancara di penelitian ini akan dilakukan ke beberapa narasumber dan disini penulis mewawancarai pihak dari Pemerintah Desa Wukirsari, Ketua Pengurus Perpusdes di Pustaka Desa Wukirsari, tokoh masyarakat/ketua paguyuban Desa Wukirsari dan beberapa masyarakat di Desa Wukirsari.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perorangan. Data sekunder bentuknya berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta memperoleh data dari literatur yang relevan seperti surat kabar, buku referensi, jurnal, artikel, website

resmi yang semuanya yang berkaitan dengan kebijakan dari Peran Pemerintah Desa dalam mendukung perpustakaan untuk meningkatkan literasi di masyarakat Desa Wukirsari Imogiri Kabupaten Bantul.

3. Unit Analisis Data

Unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa di Pemerintah Desa Wukirsari selaku tokoh yang mempunyai peran yang kuat dalam mengatur dan pembuat kebijakan di dalam pemerintah. Dan obyek di penelitian ini adalah Perpustakaan Pustaka Desa Wukirsari yang digunakan dalam tolak ukur sejauh mana dukungan dari peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan literasi di masyarakat Desa Wukirsari Imogiri Kabupaten Bantul.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian guna untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian yang mencakup waktu atau kapan penelitian akan dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive sampling area, yang dimana metode ini digunakan dalam menentukan lokasi penelitian tanpa memilih tempat lain. Menurut Usman (2011:45) metode purposive sampling adalah teknik pengumpulan data atau sampel khusus berdasarkan dari tujuan penelitiannya. Lokasi

yang dijadikan bahan penelitian bertempat di Kantor Desa Wukirsari dan Perpustakaan di Pustaka Desa Wukirsari.

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini sekitar 5 bulan. Rincian waktu penelitian ini antarlain 1 bulan pertama persiapan penelitian, dilanjutkan 2 bulan penelitian dilapangan, dan terakhir 2 bulan untuk pembuatan laporan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Interview atau Wawancara

Interview adalah teknik dimana kita wawancara langsung kepada narasumber yang akan kita beri pertanyaan terkait apa yang akan kita teliti. Teknik wawancara ini penulis akan melakukan beberapa dialog dengan narasumber. Berikut ini adalah daftar narasumber yang akan dijadikan objek didalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.3
Daftar Narasumber Penelitian

NO	SUBJEK	JUMLAH
1	Pemerintah Desa	
	a. Kepala Desa Wukirsari	1
	b. Ketua BPD Desa Wukirsari	1
2	a. Ketua Pengurus Perpustakaan Pustaka Desa Wukirsari	1
	b. Anggota Pengurus Pustaka Desa	1
3	Tokoh Masyarakat dan paguyuban Desa Wukirsari	

	a. Paguyuban Kalen Lupatmo	1
	b. Karang Taruna Budi Luhur Wukirsari	1
4	Masyarakat Desa Wukirsari	2
	Total	8

b. Dokumentasi

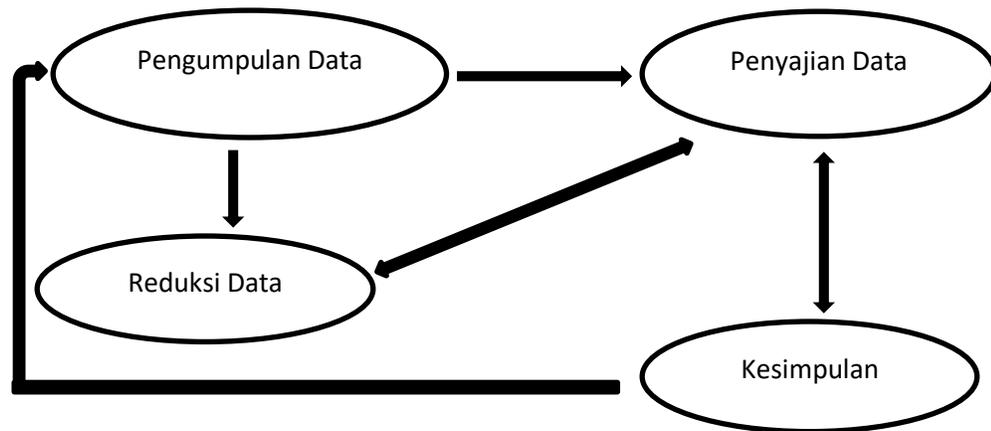
Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis akan mendokumentasikan benda-benda tertulis seperti data masyarakat dan organisasi dari kelurahan setempat, dokumen dan juga gambar. Dokumentasi ini meliputi profil Desa Wukirsari, Dokumen RPMDes 2016-2022 Desa Wukirsari , dan Website resmi pemerintah, dan bukti-bukti kegiatan berbentuk foto yang di dokumentasikan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan dan mengurutkan data sesuai dengan kategori, pola dan kesimpulan dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, sehingga dapat dirumuskan analisa yang kuat sesuai dengan data. Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimana kesimpulan di dapat dari data dan fakta dilapangan. Selanjutnya pernyataan atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudan ditarik pada persoalan yang bersifat khusus dan spesifik dengan menggabungkan antara fakta-fakta yang ada dengan berdasarkan pada teori yang ada guna untuk melengkapi penjelasan yang di perlukan.

Dalam menyusun penelitian ini menjadi lengkap beserta dengan data yang valid, proses analisa menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

Bagan 1.1
Komponen Analisis Data Deskriptif Kualitatif



Sumber : Andrian, 2018

1. Mencari data yang ada di lapangan kemudian menelaah data tersebut dari berbagai sumber yang dipercaya berkaitan dengan peran pemerintah dalam kebijakan mendukung Perpudas untuk meningkatkan literasi di masyarakat Desa Wukirsari.
2. Reduksi data atau pembuatan abstraksi data dari pihak terkait yang kemudian dapat dijadikan pernyataan yang rinci sebagai tolak ukur dalam pembuatan laporan penelitian.
3. Penyajian data, merupakan kumpulan dari informasi yang telah tersusun untuk selanjutnya dijadikan kesimpulan.

4. Kesimpulan, merupakan jawaban dari masalah dalam penelitian yang diperkuat melalui pernyataan hasil dari analisis deskripsi dalam penelitian yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya.